

ANALISIS INOVASI WARAK NGENDOG DALAM PERSPEKTIF *NEW PUBLIC GOVERNANCE*

Petrus Perlindungan Zai¹, Bintoro Wardiyanto²
Universitas Airlangga^{1,2}
petrus.perlindungan.zai-2023@fisip.unair.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan analisis pelaksanaan dari Inovasi Warak Ngendog berkaitan dengan prinsip kolaborasi dan kerjasama aktor yang ada di dalam sistem yang dibangun. **Metode** penelitian ini adalah kualitatif yang bersumber dari tinjauan literatur dengan jenis penelitian studi kasus. **Hasil penelitian** *New Public Governance* (NPG) adalah konsep baru yang diperkenalkan pada tahun 2000, yang berfokus pada kemitraan publik-privasi dalam pengiriman layanan publik. Ia menekankan pentingnya interkoneksi antara sektor publik dan swasta, meningkatkan efektivitas layanan publik dan mempromosikan partisipasi publik. NPG bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik dengan mempromosikan kerjasama antara organisasi publik dan swasta. **Simpulan** Warak Ngendog, sebuah inisiatif bersama dalam pendekatan baru untuk memerangi Covid-19. Inovasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sektor. Inisiatif ini mencakup aspek 3T seperti pelacakan, pengujian, dan perawatan, serta sistem manajemen proses menggunakan *platform Digital Strong*. Inisiatif ini juga berfokus pada Co-production dalam konteks *New Public Governance*, mengatasi krisis yang disebabkan oleh virus Covid-19. Inisiatif ini diharapkan berkontribusi pada mobilisasi sumber daya untuk pencegahan Covid-19, faktor penting dalam keberhasilan Warak Ngendog.

Kata Kunci: *Co-Production, New Public Governance, Warak Ngendog.*

ABSTRACT

This research aims to describe the implementation analysis of Ngendog's Warak Innovation in relation to the principles of collaboration and cooperation of actors in the built system. These research methods are qualitative sources of a literature review with the type of case study research. The New Public Governance (NPG) research is a new concept introduced in 2000, which focuses on public-private partnerships in the delivery of public services. It emphasizes the importance of interconnection between the public and private sectors, improving the effectiveness of public service and promoting public participation. Ngendog's timetable conclusion, a joint initiative in a new approach to fighting Covid-19. This innovation aims to integrate different sectors. The initiative covers 3T aspects such as tracking, testing, and treatment, as well as process management systems using the Digital Strong platform. It also focuses on Co-production in the context of New Public Governance, addressing the crisis caused by the Covid-19 virus. This initiative is expected to contribute to the mobilization of resources for the prevention of COVID-19, an important factor in the success of Warak Ngendog.

Keywords: *Co-Production, New Public Governance, Warak Ngendog.*

PENDAHULUAN

Warak Ngendog (Lawan Corona Virus Kota Semarang Dengan Dukungan Integrasi Program Dan Bergerak Bersama) merupakan salah satu Inovasi pemerintah kota Semarang dalam upaya penanganan Covid-19. Inovasi ini terpilih sebagai salah satu Inovasi pelayanan publik terpuji tahun 2022 dalam Rangkaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan.go.id 2022). Inovasi ini merupakan sebuah gerakan dengan melibatkan banyak pihak untuk turut serta dalam upaya penanganan Covid-19. Inovasi Warak Ngendog diimplementasikan dengan prinsip Bergerak bersama dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan juga penduduk atau masyarakat.

Munculnya gagasan pembentukan Inovasi Warak Ngendog (Lawan Corona Virus Kota Semarang Dengan Dukungan Integrasi Program Dan Bergerak Bersama) disebabkan oleh merebaknya kasus Covid-19 di Kota Semarang Sejak pertama kali sampai dengan tahun 2021 tercatat sebanyak 16.552 kasus. Bahkan, kota Semarang menjadi wilayah yang tertinggi dalam jumlah kasus Covid-19 atau Corona di Jawa Tengah dan terus mengalami peningkatan signifikan (Angling Adhitya Purbaya 2020). Bahkan, ketika kota lain sudah mulai mengalami penurunan, Kota Semarang malah sebaliknya mengalami peningkatan karena kendornya protokol kesehatan yang diterapkan (Farasonalia, 2022).

Peningkatan ini sangat berdampak di berbagai sektor tidak hanya sektor kesehatan, namun juga pada sektor ekonomi. Sebagai upaya meningkatkan penanganan penyakit menular berpotensi wabah di Kota Semarang terutama Covid-19 Dinas Kesehatan kota

Semarang meluncurkan Inovasi Warak Ngendog untuk menciptakan sebuah sistem kolaborasi dalam upaya penanganan Covid-19.

Inovasi Warak Ngendog memiliki dampak positif terutama di dalam penurunan level PPKM mulai dari level empat hingga level 1. Implementasi Warak Ngendog memiliki empat aspek utama antara lain 3T, bidik Program Kesehatan (PROKES), percepatan vaksinasi dengan dukungan *platform Digital Strong* atau integrasi data *warehouse* penanganan Covid-19 kota Semarang dan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Siaga Candi Hebat dilakukan secara terintegrasi dan Bergerak bersama.

Aspek 3T meliputi *Tracking*, *Testing* dan *Treatment* dilakukan dengan dukungan Info Covid yang menginformasikan secara *real-time* laporan dari fasilitas kesehatan dan masyarakat kepada Puskesmas dan pemangku wilayah setempat. Selain itu, penyelidikan epidemiologi dilakukan secara cepat tepat dengan Bidik Covid, dilengkapi dengan layanan *counter* atau konsultasi dokter dan lantang sebagai fasilitas untuk pasien isolasi mandiri dan pemantauan pelaku perjalanan melalui aplikasi Si Datang. Dalam aspek protokol kesehatan pemantauan proses dilakukan secara rutin oleh petugas Puskesmas dengan dukungan pemangku wilayah yang tercatat dalam Bidik Prokes dan dengan upaya perluasan informasi protokol Kesehatan melalui sosial media maupun *WhatsApps Blast* yang merupakan aplikasi untuk menyebarkan segala informasi secara cepat. Pada aspek percepatan vaksinasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan antara lain sentra vaksinasi, Ndodog Lawang, layanan vaksinasi *door-to-door*, vaksin *Drive Thru* yaitu layanan vaksin di rumah dinas Walikota dengan rentang waktu pelayanan selama 24 jam, Gebyar

vaksin Ramadan, yaitu layanan vaksin sesuai permintaan masyarakat dilakukan secara berkelompok dan seluruh kegiatan pelayanan vaksin ini didukung dengan *Victori*.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi kekuatan besar bagi pemerintah daerah dalam menangani pandemi secara cepat (Tambun 2021). Bahkan, sejak memimpin pemerintahan kota Semarang, sudah meluncurkan kegiatan Gerakan Bersama. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, bahwa pembangunan kota perlu dukungan dari semua pihak, tidak boleh hanya menjadi beban pemerintah saja. Demikian juga dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19 perlu membuat gerakan bersama yang diwujudkan dalam program Warak Ngendog. Program ini telah berkontribusi dalam pencapaian vaksin Covid-19 yang sudah jauh di atas target 100% dengan memiliki prinsip Bergerak bersama dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan juga penduduk atau masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data berasal sepenuhnya dari tinjauan literatur. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian mengenai status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktor pelaksana Inovasi Warak Ngendog Kota Semarang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles and Huberman. yang terdiri dari empat tahapan, diantaranya:

Tahap pertama adalah pengumpulan data (*data collection*), dalam penelitian kualitatif secara umum diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau bisa dengan studi literatur. Dalam penelitian ini, kami sebagai peneliti akan menggunakan mekanisme pengumpulan data secara online.

Tahap kedua adalah reduksi data (*data reduction*). Dalam tahap ini peneliti me-rangkum, menyeleksi, dan memfokuskan pada data atau informasi penting dan sesuai dengan pokok bahasan. Melalui tindakan tersebut akan memudahkan peneliti dalam menganalisa serta memfokuskan data yang didapat dengan pokok bahasan sehingga data yang didapat merupakan data yang memang penting dalam penelitian.

Tahap ketiga adalah penyajian data. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam membaca dan menganalisa data yang didapat. Data yang didapat biasanya disajikan dalam bentuk teks narasi, grafik, chart, dan lain sebagainya. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pengkategorian terhadap data yang didapat agar terstruktur dan mudah dipahami.

Tahap keempat adalah *conclusion drawing/ verification*. Pada tahap ini aktivitas yang akan dilakukan, yakni penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Selain itu juga terdapat proses verifikasi atau review ulang, dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran laporan atau pernyataan yang didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *New Public Governance*

Dua dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam peran masyarakat sipil dan kolaborasi pemerintah. Perubahan ini mencakup pertumbuhan substansial dalam ukuran

dan pentingnya kolaborasi ini di banyak negara, terutama sebagai mekanisme penyampaian layanan publik, dan dalam kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat (Anheier, 2009). Semakin banyak diakui bahwa keterlibatan masyarakat menciptakan modal sosial, yang berkontribusi pada fungsi yang lebih baik dari masyarakat, ekonomi dan sistem politik. Kolaborasi yang membentuk infrastruktur sosial masyarakat sipil, mewujudkan keterlibatan ini dan memfasilitasi terciptanya kepercayaan, inklusi sosial, dan tanggung jawab bersama (Putnam 2000). Perubahan ini terus mengalami perkembangan hingga kemudian membentuk sebuah konsep yang baru dan dikenal sebagai *New Public Governance*.

Perkembangan teori *New Public Governance* dimulai dengan adanya para pengkritik yang menyatakan bahwa manfaat *New Public Management* (NPM) hanya bersifat parsial dan masih diperdebatkan (Pollitt, 2000). *New Public Management* (NPM) telah dikritik karena fokus intra-organisasinya dalam lingkungan yang semakin majemuk, terfragmentasi, dan antar-organisasi, serta karena ketaatannya pada penerapan teknik-teknik bisnis yang sudah ketinggalan zaman dalam implementasi kebijakan publik dan pemberian layanan publik meskipun semakin banyak bukti bahwa teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan (Flynn 2002; Rhodes 1997).

Sehubungan dengan kritik-kritik tersebut, sebuah pendekatan baru muncul di bidang kebijakan publik pada awal tahun 2000-an, yang disebut *New Public Governance* (NPG). Meskipun tata kelola pemerintahan publik bukanlah istilah baru dalam retorika administrasi publik dan *New Public Management* (NPM), namun kini dikenal sebagai pendekatan yang berbeda dengan sendirinya (Osborne 2010).

Dengan mengandalkan teori tata kelola kelembagaan dan jaringan, *New Public Management* (NPM) mengandaikan adanya negara yang plural, di mana berbagai aktor yang saling bergantung berkontribusi pada penyediaan layanan publik, dan negara yang pluralis, di mana berbagai proses menginformasikan proses pembuatan kebijakan. *New Public Governance* (NPG) berkaitan dengan tekanan lingkungan institusional dan eksternal yang memungkinkan dan menghambat implementasi kebijakan publik dan penyediaan layanan publik dalam sistem yang majemuk dan plural. Pendekatan ini berfokus pada jaringan layanan antar organisasi dan peran pemerintah dalam mengatur berbagai pihak ketiga, menekankan pada efektivitas layanan dan hasil yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara organisasi layanan publik dan lingkungannya (Osborne 2010; Salamon, 2015). Jaringan-jaringan ini penuh dengan ketidaksetaraan kekuasaan yang harus berhasil dinavigasi untuk pembuatan kebijakan dan pemberian layanan yang efektif. Basis nilai dalam jaringan semacam itu sering kali tersebar dan diperebutkan. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan Osborne (2010), *New Public Governance* (NPG) merupakan produk dan sekaligus respons terhadap sifat implementasi kebijakan publik yang semakin kompleks, majemuk, dan terfragmentasi di abad ke-21.

Berbeda dengan pendekatan NPM, yang menekankan ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mengambil alih fungsi-fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah, *New Public Governance* (NPG) menekankan kekuatan signifikan yang dapat dibawa oleh organisasi nirlaba dan komunitas *non profit* ke dalam penyediaan layanan publik (Salamon, 2015). Secara khusus, organisasi nirlaba dianggap memiliki keunggulan yang signifikan

dibandingkan dengan jenis penyedia layanan publik lainnya, termasuk pengetahuan unik yang berasal dari kedekatannya dengan kelompok pengguna yang berbeda, kapasitas yang lebih besar untuk menyesuaikan layanan holistik dengan kebutuhan klien, fleksibilitas, dan kemampuan untuk berinovasi, keahlian dalam memobilisasi sukarelawan dan sumber daya amal swasta, dan keuntungan untuk mempromosikan nilai-nilai sosial yang penting, seperti keberagaman, rasa kebersamaan, dan aktivisme kewarganegaraan, serta kapasitas untuk mendemokratisasikan layanan publik melalui *Co-Production* dan keterlibatan pengguna (Bode, 2014; Bode, 2014; Pestoff dan Brandesen 2010). Karena alasan-alasan tersebut, pendekatan *New Public Governance* (NPG) membutuhkan kolaborasi yang luas antara pemerintah dan sektor nirlaba dalam penyediaan layanan publik (Salamon, 2015).

Sistem Kolaborasi dalam *New Public Governance* (NPG)

Pendekatan *New Public Governance* (NPG) lebih menekankan pada kolaborasi yang efektif dan efisien di antara para penyedia layanan, dan jaringan penyedia layanan yang berfungsi dengan baik yang terhubung dengan para penyandang dana pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan kolaborasi di antara lembaga-lembaga nirlaba yang menyediakan layanan bersama.

Penganut Tata Kelola Pemerintahan Publik Baru telah mencoba bergulat dengan konfigurasi baru sistem penyampaian layanan yang didanai pemerintah ini dengan memperhatikan jaringan. Oleh karena itu, para pakar Tata Kelola Pemerintahan Publik Baru dikenal dalam menganalisis hubungan kolaboratif antara organisasi nirlaba atau komersial yang menyediakan layanan

yang didanai publik dan perwakilan pemerintah yang menandatangani kontrak dengan organisasi-organisasi tersebut, kemudian mendanai dan mengawasi layanan serta hasil-hasilnya.

Hubungan kolaboratif terjadi melalui "upaya antar organisasi untuk mengatasi keuntungan bersama atau kepentingan bersama di antara organisasi melalui proses pertukaran informasi dan berbagi sumber daya" (Alter, 1993). Promosi hubungan semacam itu mencerminkan tren politik di masa lalu, seperti privatisasi layanan publik, pengurangan ukuran pemerintah, devolusi, reformasi kesejahteraan, dan pencarian biaya yang lebih rendah serta peningkatan kualitas layanan (Slyke, 2003).

Dalam pandangan Chris Cornforth, (2015) mendefinisikan kolaborasi sebagai pengaturan kerja bersama yang diformalkan antara organisasi-organisasi yang tetap otonom secara hukum sambil terlibat dalam tindakan kolektif yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh masing-masing organisasi secara sendiri-sendiri.

Istilah "kolaborasi" dalam *New Public Governance* (NPG) dapat dikatakan sebagai kolaborasi dapat menggambarkan hubungan antar organisasi antara penyandang dana (biasanya entitas pemerintah) dan penyedia layanan (lembaga nirlaba atau perusahaan bisnis). Selain itu, kolaborasi juga dapat dimaksudkan sebagai hubungan kolaboratif yang menggambarkan hubungan koordinatif atau hubungan lain yang berkaitan dengan sumber daya bersama yang dapat terjadi di antara berbagai lembaga penyedia layanan nirlaba yang bekerja sama dalam menangani masalah sosial yang kompleks. Sebuah jaringan dapat dibentuk di antara mereka, dan dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga nirlaba

ini dapat dikelola dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh sebuah organisasi jaringan administratif tambahan (seringkali nirlaba) yang menjadi perantara, yang juga berkomunikasi dan melapor kepada penyandang dana pemerintah (Provan dkk, 2004).

Prinsip *Co-Production* dalam *New Public Governance* (NPG)

Harus disadari bahwa *Co-Production* merupakan hasil eksplisit dari pengambilan keputusan oleh konsumen yang mencerminkan preferensi mereka sendiri. Produksi bersama (*Co-Production*), yang dapat terjadi dalam proses produksi yang mendahului tahap penggunaan. Proses produksi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan operasional yang berurutan yang terhubung dalam rantai jaringan (Achrol, 1999) dengan setiap rangkaian kegiatan yang mengarah ke kegiatan berikutnya (Porter 1985), dan yang didefinisikan sebagai rantai jaringan kegiatan.

Berbagai aktivitas tersebut melibatkan pekerjaan intelektual dalam memulai dan merancang, mengumpulkan sumber daya, dan memproses aktivitas yang mengarah pada penciptaan output yang berfungsi sebagai platform untuk pengiriman nilai yang digunakan/dikonsumsi di kemudian hari, hingga memastikan pengiriman dan penggunaan (konsumsi). *Co-Production* menyiratkan bahwa konsumen berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam satu atau lebih tahapan ini.

Co-Production mencakup semua format kerja sama antara konsumen dan mitra produksi. Dengan demikian, konsumen dapat bekerja sama dengan badan-badan publik dan pemerintah dalam menyediakan pendidikan, memelihara lingkungan yang bersih, dan menyediakan keamanan lokal (Whitaker 1980). Pralahad (2004) mengusulkan

bahwa, dalam menciptakan nilai bersama, "pengalaman penciptaan bersama sangat bergantung pada individu. Keunikan setiap orang mempengaruhi proses penciptaan bersama". Dengan demikian, *Co-Production* secara langsung terkait dengan penyesuaian. Dengan cara ini, *Co-Production* membantu memecah penawaran pasar dan membantu operasi pemasaran satu-ke-satu. Oleh karena itu, *Co-Production* harus dipandang sebagai hal yang berkaitan dengan perluasan pilihan yang dihadapi konsumen.

Proses *Co-Production* mencakup lima tahap yang berbeda (Etgar 2008) sebagai berikut: (1) pengembangan kondisi pendahulu, (2) pengembangan motivasi yang mendorong konsumen untuk terlibat dalam *Co-Production*, (3) penghitungan biaya dan manfaat *Co-Production*, (4) aktivasi ketika konsumen terlibat dalam kinerja aktual kegiatan *Co-Production*, (5) pembuatan output dan evaluasi hasil proses.

Pada tahap pertama, munculnya kondisi-kondisi yang mendahului agar konsumen bersedia terlibat dalam produksi bersama. Beberapa kondisi sebelumnya harus ditetapkan. Kondisi tersebut meliputi kondisi lingkungan makro, kondisi yang terkait dengan konsumen, kondisi yang terkait dengan produk, dan kondisi yang terkait dengan situasi.

Tahap kedua pengembangan motivasi yang mendorong konsumen untuk terlibat dalam *Co-Production* untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mencerminkan nilai-nilai konsumen yang beragam dan berfungsi sebagai kekuatan motivasi-dorongan psikologis yang mendorong konsumen untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Daftar dorongan yang berpotensi relevan dikembangkan dari model ekonomi dan perilaku konsumen. Hal ini meliputi dorongan ekonomi, psikologis dan sosial.

Tahap ketiga-evaluasi biaya dan analisis biaya-manfaat. Pada tahap yang terjadi dalam proses ini, konsumen melakukan analisis biaya-manfaat yang mengevaluasi manfaat yang mereka harapkan akan diperoleh dari *Co-Production*, dan menimbanginya dengan biaya-biaya yang relevan untuk terlibat dalam *Co-Production*. Hasil akhir dari analisis ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk masuk dan terlibat dalam *Co-Production* atau menghindari keterlibatan tersebut.

Tahap keempat adalah aktivasi ketika konsumen terlibat dalam kinerja aktual kegiatan *Co-Production*. Begitu konsumen memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan *Co-Production*, mereka bergerak ke tahap berikutnya dalam proses aktivasi. Aktivasi menuntut, pertama-tama, agar konsumen memilih tingkat rantai kegiatan produksi-konsumsi yang ingin mereka ikuti.

Tahap kelima adalah pembuatan output dan evaluasi hasil proses. Hasil akhir dari tahap aktivasi adalah terciptanya beberapa output dalam bentuk berbagai manfaat yang diterima konsumen dan perlu dievaluasi. Konsumen membandingkan nilai yang diterima dengan tujuan yang ditetapkan pada tahap kedua dari proses tersebut. Untuk tujuan tersebut, konsumen dapat menerapkan berbagai metode kalkulus pengambilan keputusan, mendefinisikan kepentingan relatif dari berbagai manfaat dan menentukan bagaimana mengukur keberhasilan atau kegagalan, dan metrik mana yang harus digunakan untuk tujuan tersebut. Untuk memutuskan apakah upaya tersebut bermanfaat, mereka perlu membandingkan efektivitas strategi *Co-Production*.

Secara keseluruhan, *New Public Governance* (NPG) mendorong adanya kolaborasi atau kerjasama yang melibatkan banyak aktor untuk membantu masyarakat dalam

mendapatkan layanan publik. Pendekatan NPG merupakan pendekatan yang lebih menunjukkan peran pemerintah sebagai regulator dan kerjasama swasta dan nirlaba serta masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama. Salah satu bentuk yang dikembangkan dalam kerjasama ini, yakni dalam konsep *Co-Production*.

Inovasi Warak Ngendog dalam Perspektif *New Public Governance*

Inovasi Warak Ngendog (Lawan Corona Virus Kota Semarang Dengan Dukungan Integrasi Program Dan Bergerak Bersama) merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, swasta dan juga penduduk atau masyarakat di Kota Semarang dalam menangani pandemi Covid-19. Inovasi ini melibatkan banyak peran aktor yang turut terlibat untuk saling bekerjasama dalam satu tujuan bersama, mulai dari pemerintah, swasta dan terlebih peran serta masyarakat dan komunitas masyarakat yang ada di kota Semarang.

Bentuk Inovasi ini dianalisis dalam teori *New Public Governance* yang juga berkembang dengan menitikberatkan pada kolaborasi atau sistem kerjasama. Teori ini memperlihatkan sebuah penekanan penting pada keterlibatan masyarakat yang dapat menciptakan modal sosial, yang berkontribusi pada fungsi yang lebih baik dari masyarakat, ekonomi dan sistem politik. Kolaborasi yang membentuk infrastruktur sosial masyarakat sipil, mewujudkan keterlibatan ini dan memfasilitasi terciptanya kepercayaan, inklusi sosial, dan tanggung jawab bersama (Putnam 2000).

Demikian dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang. Pemerintah kota Semarang sejak awal telah melakukan banyak gerakan bersama masyarakat dalam berbagai program pembangunan kota.

Hal ini juga disampaikan oleh walikota Semarang di mana keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari edukasi bahwa pembangunan kota merupakan tanggung jawab bersama. Dalam konteks penanganan pandemi covid-19 pemerintah kota Semarang juga melakukan gerakan bersama untuk bersama-sama menangani pandemi covid-19.

Dalam menangani pandemi covid-19 Pemerintah Kota Semarang meluncurkan Inovasi Warak Ngendog. Program Inovasi ini dilakukan sebagai bentuk gerakan bersama dalam menangani pandemi covid-19. Berbagai aktor yang ikut berkolaborasi dalam program Inovasi ini, yakni pemerintah, komunitas masyarakat dan masyarakat, para tenaga kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan para sukarelawan.

Dalam tahapan implementasi Inovasi Warak Ngendog, terdapat empat aspek utama yang menjadi kunci keberhasilan dari Inovasi ini. Keempat aspek ini merupakan kerjasama dari berbagai aktor yang turut terlibat dalam Inovasi Warak Ngendog. Adapun keempat aspek itu, yaitu 3T, Bidik Prokes, Percepatan vaksinasi dengan dukungan platform Digital *Strong* atau integrasi data warehouse penanganan Covid-19 kota Semarang dan Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Siaga Candi Hebat dilakukan secara terintegrasi dan Bergerak bersama.

Aspek 3T meliputi *Tracking*, *Testing* dan *Treatment* dilakukan dengan dukungan Info Covid yang menginformasikan secara real-time laporan dari fasilitas kesehatan dan masyarakat kepada Puskesmas dan pemangku wilayah setempat. Aspek ini dilengkapi dengan layanan *counter* atau konsultasi dokter dan lantang sebagai fasilitas untuk pasien isolasi mandiri dan pemantauan pelaku perjalanan melalui

aplikasi Si Datang. Aspek 3T ini merupakan proyek kolaborasi antara tenaga kesehatan, masyarakat dan pemangku wilayah hingga ditingkat RT. Ketiga aktor ini yang saling bekerjasama untuk melakukan pemantauan dan pengecekan untuk memutus rantai penularan virus covid-19.

Dalam aspek protokol kesehatan pemantauan proses dilakukan secara rutin oleh petugas Puskesmas dengan dukungan pemangku wilayah yang tercatat dalam Bidik Prokes dan dengan upaya perluasan informasi protokol Kesehatan melalui sosial media maupun WA Blas yang merupakan aplikasi untuk menyebarkan segala informasi secara cepat. Proyek ini juga merupakan proyek kolaborasi antara petugas Puskesmas, pemangku wilayah, masyarakat dan komunitas serta TNI dan Polri. Dalam kolaborasi ini, setiap aktor turut bekerjasama dalam memantau proses protokol kesehatan yang dilakukan.

Pada aspek percepatan vaksinasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan antara lain sentra vaksinasi yang merupakan pusat pelaksanaan vaksin, Ndodog Lawang dengan kembali melakukan jemput bola di wilayah yang masih vaksinasinya belum mencapai target, layanan vaksinasi door-to-door, vaksin Drive Thru, yaitu layanan vaksin di rumah dinas Walikota dengan rentang waktu pelayanan selama 24 jam, Gebyar vaksin Ramadan, yaitu layanan vaksin sesuai permintaan masyarakat dilakukan secara berkelompok dan seluruh kegiatan pelayanan vaksin ini didukung dengan Victori. Proyek kolaborasi ini melibatkan banyak aktor antara petugas kesehatan, pemangku wilayah, masyarakat dan komunitas serta TNI dan Polri dan sukarelawan. Setiap aktor memiliki peran masing-masing dengan sasaran percepatan vaksinasi masyarakat kota Semarang.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Siaga Candi Hebat dilakukan secara terintegrasi dan Bergerak bersama. Program ini diinisiasi oleh POLRESTABES Semarang yang direncanakan untuk diterapkan di seluruh penjuru Kota Semarang. Kampung Siaga Candi Hebat yang bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan sosio-ekonomi masyarakat. Upaya penekanan penyebaran virus dilakukan mulai dari pengecekan suhu tubuh, pengadaan ruang isolasi, penyediaan hand sanitizers dan disinfektan, dan pembagian sembako dan vitamin. Proyek kolaborasi ini melibatkan para pemangku wilayah, masyarakat dan komunitas serta TNI dan Polri dan sukarelawan.

Analisis Inovasi Warak Ngendog dalam Konsep Co-Production

Inovasi Warak Ngendog merupakan sebuah sistem kolaborasi antar beberapa aktor dalam menangani pandemi Covid-19 di kota Semarang. Konsep *Co-Production* sendiri mencakup semua format kerja sama antara konsumen dan mitra produksi. Produksi bersama (*Co-Production*), didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan operasional yang berurutan yang terhubung dalam rantai jaringan (Achrol, 1999) dengan setiap rangkaian kegiatan yang mengarah ke kegiatan berikutnya (Porter 1985), dan yang didefinisikan sebagai rantai jaringan kegiatan. Berbagai aktivitas tersebut melibatkan pekerjaan intelektual dalam memulai dan merancang, mengumpulkan sumber daya, dan memproses aktivitas yang mengarah pada penciptaan output yang berfungsi sebagai platform untuk pengiriman nilai yang digunakan di kemudian hari, hingga memastikan pengiriman dan penggunaan.

Dalam konteks analisis Inovasi Warak Ngendog, produksi bersama dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan operasional yang melibatkan pekerjaan intelektual dalam memulai dan merancang, mengumpulkan sumber daya, dan memproses aktivitas yang mengarah pada penciptaan output yang berguna bagi masyarakat. Proses *Co-Production* mencakup lima tahap yang berbeda sebagai berikut: (1) pengembangan kondisi pendahulu, (2) pengembangan motivasi yang mendorong konsumen untuk terlibat dalam *Co-Production*, (3) penghitungan biaya dan manfaat *Co-Production*, (4) aktivasi ketika konsumen terlibat dalam kinerja aktual kegiatan *Co-Production*, (5) pembuatan output dan evaluasi hasil proses.

Pada tahap pengembangan kondisi pendahulu, keperluan akan proses *Co-Production* dimulai oleh lingkungan yang diserang oleh virus covid-19. Lingkungan makro yang mengalami gangguan seperti covid-19, membuat banyaknya masyarakat yang mengalami krisis dalam berbagai bidang kebutuhan manusia. Sementara, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan besar untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam Inovasi Warak Ngendog, banyak kolaborasi yang terjadi di dalamnya yang merupakan wujud dari produksi bersama antara berbagai aktor yang berkepentingan. Seperti halnya Kampung Siaga Candi Hebat dilakukan secara terintegrasi dan Bergerak bersama yang di dalam programnya terdapat dapur bersama, sentra vaksin bersama dan terciptanya aplikasi dan website bersama yang diciptakan bersama akibat dari keterbatasan sumber daya dalam menghadapi pandemi covid-19.

Pada tahap pengembangan motivasi yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam produksi bersama, dalam konteks Inovasi Warak Ngendog terjadi oleh dorongan ekonomi dan psikologis masyarakat. Tingginya angka PHK (BPS,2020) dan melemahnya perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat menjadi pendorong utama adanya motivasi untuk kolaborasi dan produksi bersama. Selain dorongan ekonomi, dorongan psikologis akan kekhawatiran pada kesehatan dan keselamatan mendorong masyarakat terlibat dalam upaya percepatan penanganan pandemi covid-19.

Pada tahap penghitungan biaya dan manfaat produksi bersama dalam Inovasi Warak Ngendog dilakukan oleh pemerintah kota Semarang. Tahap penghitungan biaya merupakan bagian dari mekanisme anggaran yang merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai lembaga eksekutif bersama legislatif. Tahapan ini dapat terlihat dari mekanisme mobilisasi anggaran yang dilakukan selama pandemi yang dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19.

Pada tahap aktivasi ketika masyarakat terlibat dalam kinerja aktual kegiatan produksi bersama, masyarakat perlu terlibat secara langsung dalam memasarkan produk yang dibuat bersama. Dalam konteks Inovasi Warak Ngendog dilakukan oleh pemerintah kota Semarang, sebagai masyarakat turut ikut serta dalam mendistribusikan program ini kepada masyarakat luas. Seperti halnya pelaksanaan 3T dan pendataan masyarakat yang baru datang melalui Si Datang. Peran masyarakat dalam kegiatan ini sangat diperlukan, terlebih dalam melakukan pemantauan dan pelaporan. Demikian juga dapat terlihat dalam kegiatan percepatan vaksinasi melalui Gebyar vaksin Ramadan, yaitu layanan vaksin sesuai permintaan

masyarakat dilakukan secara berkelompok dan seluruh kegiatan pelayanan vaksin ini didukung dengan Victori. Dalam kegiatan ini tentunya peran masyarakat sangat diperlukan untuk aktif dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya.

Pada tahapan pembuatan output dan evaluasi hasil proses, kegiatan ini merupakan tahap terakhir yang perlu dilakukan. Dari Inovasi Warak Ngendog dapat dilihat laporan penurunan level PPKM mulai dari level empat hingga level 1. Penurunan level ini hingga berakhirnya masa pandemi menuju pasca pandemi merupakan salah satu wujud nyata dari keberhasilan Inovasi Warak Ngendog di kota Semarang.

SIMPULAN

Warak Ngendog (Lawan Corona Virus Kota Semarang Dengan Dukungan Integrasi Program Dan Bergerak Bersama) merupakan salah satu Inovasi pemerintah kota Semarang dalam upaya penanganan Covid-19. Inovasi ini merupakan salah satu Inovasi klaster kota pelayanan publik terpuji tahun 2022. Inovasi ini merupakan sebuah gerakan bersama dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan juga penduduk atau masyarakat.

Inovasi ini dikembangkan berdasarkan prinsip kolaborasi dengan melibatkan banyak aktor, seperti mulai dari pemerintah, pemangku wilayah, komunitas masyarakat dan masyarakat, para tenaga kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan para sukarelawan. Dalam tahapan implementasi Inovasi Warak Ngendog, terdapat empat aspek utama yang menjadi kunci keberhasilan dari Inovasi ini. Keempat aspek tersebut terdiri dari 3T meliputi *Tracking*, *Testing* dan *Treatment* dilakukan dengan dukungan Info Covid yang menginformasikan secara *real-time* laporan dari fasilitas kesehatan dan

masyarakat kepada Puskesmas dan pemangku wilayah setempat. Bidik Prokes dengan pemantauan proses dilakukan secara rutin oleh petugas Puskesmas dengan dukungan pemangku wilayah yang tercatat dan juga penyebaran informasi covid-19. Percepatan vaksinasi dengan dukungan platform *Digital Strong* atau integrasi data *warehouse* penanganan Covid-19 kota Semarang dan Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Siaga Candi Hebat dilakukan secara terintegrasi dan Bergerak bersama.

Inovasi Warak Ngendog merupakan wujud implementasi *Co-Production* dalam pendekatan *New Public Governance*. Lingkungan yang diserang oleh virus covid-19 yang membuat banyaknya masyarakat yang mengalami krisis dalam berbagai bidang kebutuhan manusia menjadi pengembangan kondisi pendahulu dalam Inovasi ini. Tahapan selanjutnya ditandai dengan desakan ekonomi dan psikologis yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam produksi bersama. Pengembangan Inovasi ini perlu disertai dengan penghitungan biaya dan manfaat yang dihasilkan. Manfaat yang besar akan Inovasi ini mendorong adanya mekanisme mobilisasi anggaran dalam penanganan pandemi covid-19, salah satunya dalam wadah Inovasi Warak Ngendog. Keterlibatan masyarakat dalam mengawal dan memantau setiap program dalam Inovasi ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan Warak Ngendog hingga penurunan level PPKM mulai dari level empat hingga level 1, bahkan masuknya kota Semarang dalam masa pasca pandemi.

Dalam artikel ini, penulis merekomendasikan akan keberlanjutan program Inovasi Warak Ngendog yang menitikberatkan pada kolaborasi dan produksi bersama. Sekalipun Inovasi ini pada awalnya berkembang dengan

tujuan penanganan pandemi covid-19, namun Inovasi ini dapat dikembangkan dalam program lainnya terlebih dalam memperkuat sistem kolaborasi yang telah digagas dalam Inovasi ini. Keterlibatan banyak aktor yang saling bekerjasama akan menjadi faktor pendorong terciptanya masyarakat yang peduli akan kotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achrol, R. S, & Kotler, P. (1999). Marketing in the network economy. *Journal of Marketing*, 63, 146–164. <http://dx.doi.org/10.2307/1252108>
- Alter, C., and Hage, J. (1993). *Organizations Working Together*. Thousand Oaks, Sage. California
- Angling Adhitya Purbaya. 2020. “Semarang Nomor 1 COVID-19 Terbanyak, Walkot Bicara Pasien Masuk RS Sudah Parah.” *DetikNews*. August 2020.
- Anheier, H. K. (2009). What Kind of Nonprofit Sector, What Kind of Society? Comparative Policy Reflections. *American Behavioral Scientist*, 52(7), 1082-1094. <https://doi.org/10.1177/0002764208327676>
- Bode I., Brandsen T. (2014). State-Third Sector Partnerships: A Short Overview of Key Issues in the Debate: Introduction to the Special Issue on State-Third Sector Partnerships. *Public Management Review*, 16, 1055-1066. <https://doi.org/10.1080/14719037.2014.957344>
- Bode, I. (2014). *Towards a Neoliberal Third Sector? International Lessons from Recent Developments in China*. In *Modernizing Democracy. Associations and Associating in the 21st Century*. Springer. New York
- Etgar, Michael. 2008. “A Descriptive Model of the Consumer *Co-Production* Process.” *Journal of the*

- Academy of Marketing Science* 36, no. 1: 97–108. <https://doi.org/10.1007/s11747-007-0061-1>.
- Farasonalia, R., Arief, T. M. V. (02, Februari 2022). Kasus Covid-19 Di Semarang Meningkat, Masyarakat Disebut Sudah Abai Prokes. Kompas.Com. Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2022/02/02/160528778/kasus-covid-19-di-semarang-meningkat-masyarakat-disebut-sudah-abai-prokes?page=all>
- Flynn, N. (2002). *Public Sector Management*. Prentice Hall. London
- Fourforth, C., Hayes, J. P., Bangen. S. (2015). Nonprofit–Public Collaborations: Understanding Governance Dynamics. *Sage Journal*. 44(4). <https://doi.org/10.1177/0899764014532836>
- Menpan.go.id. 2022. “Inilah Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2022!” *Menpan.Go.Id*. July 28, 2022.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge: Taylor & Francis Group. London and New York
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Ikapi.
- Pollitt, C. and Bouckaert, G. (2000). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press, Long Range Planning
- Porter, M. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Simon and Shuster. New York:
- Pralahad, C. K., Ramaswamy, V. (2004). *The Future of Competition: Co-Creating Unique Value with Customers*. Mass: Harvard Business School Press. Boston
- Provan, K. G., Kimberly R. Isett, and H. B. M. (2004). Cooperation and Compromise: A Network Response to Conflicting Institutional Pressures in Community Mental Health. *Sage Journal*. 33(3). 489–514. doi:10.1177/0899764004265718.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone*. Simon & Schuster. New York
- Rhodes, R. (1997). *Understanding Governance*. Open University Press. Buckingham
- Salamon, L. M., & Toepler, S. (2015). Government-Nonprofit Cooperation: Anomaly or Necessity? *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 26(6), 2155–2177. <http://www.jstor.org/stable/43654830>
- Slyke, D. M. V. (2003). The Mythology of Privatization in Contracting for Social Services. *PAR: Public Administration Review* 63(3) 296–315. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00291>
- Tambunan, L. T. (20, Mei 2021). Wali Kota Semarang: Keterlibatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 Adalah Kekuatan Besar. Beritasatu.Com. Diakses dari: <https://www.beritasatu.com/news/776279/wali-kota-semarang-keterlibatan-masyarakat-dalam-penanganan-covid19-adalah-kekuatan-besar>
- Whitaker, G. (1980). Coproduction: Citizen participation in service delivery. *Public Administration Review*. 40. 240–246. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/coproduction-citizen-participation-service-delivery>